

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Ketika masa lampau secara umum masyarakat yang mengalami kemiskinan bukan hanya dikarenakan kurangnya kebutuhan secara pangan namun kemiskinan berbentuk aksesibilitas ataupun material yang minim. Melalui berbagai ukuran kehidupan modern sekarang ini masih ada yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan serta berbagai hal yang memudahkan yang sudah disediakan di zaman modern. Masyarakat menderita miskin memiliki penyebab yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayahnya.

Pada wilayah kota masyarakat yang mengalami kemiskinan dapat bertumbuh dikarenakan adanya urbanisasi penduduk yang semakin meningkat melalui wilayah desa. Terjadinya kemiskinan antara lain dikarenakan pasokan pekerja yang semakin meningkat, namun kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sangat memiliki batasan dan tingkat penghasilan yang rendah dalam berbagai aktivitas-aktivitas lainnya, penduduk yang padat dan angka pendatang baru yang semakin tinggi dimana masih tidak berkualifikasi dalam melakukan pekerjaan, tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap taraf kemakmuran penduduk pada wilayah Kabupaten Bekasi. (Muhammad Iskandar, 2010).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat,

serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kemiskinan di Daerah Kabupaten Bekasi sendiri berada tingkat 16 pada wilayah Jawa Barat tersebut yang dimana tingkat jumlah dan rata-rata penduduk masih tergolong cukup tinggi. (Sumber Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2020).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menjamin secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup,
- b) Mencegah permasalahan sosial ,
- c) Menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial,
- d) Memuhlikan kondisi sosial dalam rangka mencapai kerberfungsian sosial,
- e) Mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian,
- f) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial,

- g) Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,
- h) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS):

- a) Anak balita terlantar,
- b) Anak terlantar,
- c) Anak jalanan,
- d) Lanjut usia terlantar,
- e) Gelandangan,
- f) Penyandang cacat/ penyandang disabilitas
- g) Korban bencana alam,
- h) Keluarga fakir miskin,
- i) Keluarga berumah tidak layak huni,
- j) Pengemis,
- k) Korban bencana sosial atau pengungsi.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan sosial di laksanakan melalui:

- a) Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

- b) Penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial,
- c) Penyediaan atau pemberi kemudahan sarana dan prasarana kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial,
- d) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan fasilitasi partisipasi masyarakat dan atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan dengan kegiatan pemihakan terhadap masyarakat yang mengalami kemiskinan disertai aktivitas-aktivitas dalam mengambil putusan melalui beberapa alternatif tentang target serta berbagai cara yang nantinya dilakukan pada waktu mendatang maupun tahap menyusun perencanaan keuangan yang berguna agar tercapainya hal-hal yang diharapkan yakni menanggulangi tingkat kemiskinan dan memonitoring serta evaluasi terhadap suatu pertumbuhan dari hasil implementasinya yang kemudian dilaksanakan dengan terstruktur serta memiliki kesinambungan satu sama lain (M. Khusaini, 2019).

Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan atau disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi salah satu rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk mewujudkan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Maka dari ini penelitian mengambil tujuan pada poin 1 (satu) yakni; Tanpa Kemiskinan yang dimana pada tujuan maupun target dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu:

1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$ 1, 25 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sekitar Rp.7.800 per hari.
2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki laki, perempuan, dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.

3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi.
5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro. Daya tahan dan kesiapan masyarakat dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial dan bencana.

Adapun jenis kemiskinan pada penelitian ini, kemiskinan *Absolut* yang dimana jenis kemiskinan ini merupakan dimana seseorang atau keluarga yang kurang mampu yang memiliki pemasukan dibawah penunjang kelayakan atau dibawah garis kemiskinan pendapatannya tersebut tidak memenuhi kebutuhan primer nya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan.

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2015- 2020

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi |
|-------|--|
| 2015 | 169. 200 Jiwa |
| 2016 | 164. 410 Jiwa |
| 2017 | 163. 950 Jiwa |
| 2018 | 157. 210 Jiwa |
| 2019 | 149. 430 Jiwa |
| 2020 | 186. 300 Jiwa |

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020

Dapat kita perhatikan pada tabel di atas angka kemiskinan pada tahun 2015 angka

| Wilayah Kabupaten Sendiri | Garis Kemiskinan Kabupaten Bekasi | | |
|--|-----------------------------------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Bekasi | 463 507 | 481 732 | 518 667 |
| Rupiah/Kapita/Bulan | | | |
| 2019: angka sementara; 2020: angka sangat sementara; berdasarkan 18 Maret 2021 | | | |

kemiskinan ini sangat tinggi mencapai 169.200 jiwa, tahun 2016 angka kemiskinan mencapai 164.410 jiwa, tahun 2017 mencapai angka 163.950 jiwa, tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 157.210 jiwa, tahun 2019 angka kemiskinan turun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dan mencapai angka 149.430 jiwa, dan tahun 2020 angka kemiskinan melambung tinggi angka kemiskinan mencapai 186.300 jiwa karena terdampak wabah Covid-19.

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Bekasi (Rupiah), 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi

Tabel 1.3 Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan 2013

| Kecamatan | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Cacat |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| Setu | - | - | - | 25 | 55 |
| Serang Baru | 10 | 45 | 9 | 236 | 215 |
| Cikarang Pusat | 8 | 135 | 30 | 240 | 130 |

| | | | | | |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Cikarang Selatan | 10 | 58 | - | 230 | 165 |
| Cibarusah | 10 | 179 | - | 265 | 110 |
| Bojong mangu | 2 | 40 | 51 | 68 | 124 |
| Cikarang Timur | - | 5 | - | 92 | 185 |
| Kedung waringin | 15 | 25 | 26 | 210 | 228 |
| Cikarang Utara | 45 | 156 | 24 | 486 | 218 |
| Karang bahagia | 41 | 185 | 38 | 259 | 238 |
| Cibitung | - | 90 | 486 | 600 | 353 |
| Cikarang Barat | - | - | 132 | 121 | 258 |
| Tambun Selatan | 5 | 165 | 206 | 295 | 268 |
| Tambun Utara | - | 2 | 324 | 166 | 56 |
| Babelan | 94 | 189 | 27 | 330 | 266 |
| Tarumajaya | 45 | 190 | - | 235 | 156 |
| Tambelang | 90 | 111 | 10 | 265 | 204 |
| Sukawangi | - | 186 | 285 | 144 | 49 |
| Sukatani | 10 | 3 | 10 | 43 | 285 |
| Sukakarya | - | 427 | 746 | 582 | 181 |
| Pebayuran | 11 | 193 | 320 | 61 | - |
| Cabang bungin | - | 456 | 162 | 22 | 200 |
| Muara gembong | 9 | 293 | - | 358 | 285 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi

Tabel 1.4 Daftar Desa Kecamatan Sukatani

| Desa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Banjarsari | 4.497 Jiwa | 4.676 Jiwa | 9.173 Jiwa |
| Sukaasih | 3.082 Jiwa | 2.970 Jiwa | 6.052 Jiwa |
| Sukadarma | 4.939 Jiwa | 4.597 Jiwa | 9.536 Jiwa |
| Sukahurip | 3.117 Jiwa | 3.174 Jiwa | 6.291 Jiwa |
| Sukamanah | 7.931 Jiwa | 7.740 Jiwa | 15.671 Jiwa |
| Sukamulya | 8.019 Jiwa | 8.030 Jiwa | 16.049 Jiwa |
| Sukarukun | 7.994 Jiwa | 7.343 Jiwa | 15.337 Jiwa |
| Jumlah | 39.579 Jiwa | 38.530 Jiwa | 78.109 Jiwa |

Sumber: Data Penduduk Desa Sukatani

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tingkat penduduk miskin dari tahun 2015- 2017 terus meningkat dari 169.200 jiwa mencapai 186. 300 Jiwa. Adapun garis kemiskinan di daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2018-2020 juga meningkat mulai 463.507 mencapai 518.667 rupiah, serta banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan 2013 Daerah Sukatani anak balita terlantar (10), Anak terlantar (3), wanita rawan sosial ekonomi (10), lanjut usia terlantar (43), penyandang cacat atau disabilitas (285) .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi?

2. Bagaimana capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin 1 (satu) melalui Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi
2. Menganalisis capaian *Sustainable Development Goals* poin 1 (satu) melalui Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, maka peneliti membagi signifikansi menjadi dua hal yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai penanggulangan kemiskinan berbasis Kegiatan Usaha Bersama(KUBE) ditulis oleh (Wulan, 2019, Arif Haryana 2009, Meitasari, 2015, Roebyantho dan Unayah 2015, Yacoub 2012, Ade Triyono 2019, Prawoto 2008, Putera 2007). Adapun penelitian ini berfokus Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi, strategi untuk mewujudkan keberhasilan Kebijakan Pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-1 (satu) melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan. Penelitian ini mengacu teori George C. Edwards III tentang empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan publik,

antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Serta menggunakan paradigma konstruktivisme.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara serta dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

Rujukan Pertama, adalah jurnal yang ditulis oleh Arif Haryana (2009) dengan judul Teori dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dalam Upaya Mendorong Terpenuhnya Hak Rakyat Atas Pangan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan juga ditandai dengan rendahnya *Human Development Index (HDI)*, yang menggambarkan tingkatan kehidupan masyarakat.

Sebagai dari salah satu bagian upaya untuk penanggulangan kemiskinan, sasaran dari rencana aksi pemenuhan hak atas pangan adalah terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu, serta dalam meningkatnya status gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi, dan anak balita. Target yang hendak dicapai yakni menurunnya persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, serta menurunnya angka gizi kurang baik pada anak balita menjadi 20% pada tahun 2009. Ketahanan pangan tidak dilihat dari sebagian pengentasan kemiskinan, namun juga dilihat sebagai upaya untuk membangun ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga dapat mewujudkan harus melibatkan pemerintah dan segenap rakyat Indonesia yang didukung perangkat hukum yang memadai dan menjamin ketersediaan serta akses rakyat terhadap pangan yang cukup,

aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh masyarakat.

Persamaan pada penelitian tersebut sama-sama membahas strategi dalam penanggulangan kemiskinan dalam upaya menurunkan target jumlah presentase miskin, sedangkan perbedaannya pada ketersediaan serta akses secara merata dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Rujukan Kedua, adalah jurnal yang di tulis oleh (Meitasari et al., 2015) dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Tradisional Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati). Penelitian ini menggunakan penelitian taktik yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Data-data yang penulis peroleh melalui data primer dari wawancara tidak terstruktur dan untuk memilih informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*,

Hasil Penelitian proses terbentuknya program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) adalah kesadaran pengentasan kemiskinan merupakan hak bagi setiap negara sebagaimana amanah dalam konstitusi, karena jika dibiarkan terus menerus yang terjadi adalah masyarakat kecil akan semakin terpinggirkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (PUPI) mencoba untuk mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan terutama bagi mereka nelayan harian atau *one day fishing* karena mereka diibaratkan sebagai nelayan kecil. Keberhasilan maupun kegagalan suatu program tergantung dari keterlibatan para nelayan di dalam pelaksanaan program usaha mina perdesaan (PUMP). Dikatakan sebuah kebijakan itu berhasil jika ada keikutsertaan mereka di dalam pelaksanaan, sebaliknya jika tidak ada keterlibatan mereka dalam pelaksanaan maka program pengembangan usaha mina perdesaan ini berhasil.

Tujuan Penelitian ini adalah program usaha mina perdesaan dapat dikatakan sudah tepat, tetapi hasil dan pelaksanaannya yang sudah di capai di Desa Bendar ini cukup efektif. Hasil Penelitian ini adalah wawancara telah dilakukan kepada para pejabat pengelola kecamatan Bonang, untuk mengetahui desa-desa yang mendapatkan sehingga ketika dilaksanakan peneliti tidak salah sasaran.

Persamaan penelitian ini kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya apabila dalam suatu program itu berhasil atau gagal dalam pelaksanaan maka ada keikutsertaan mereka dalam pelaksanaannya agar tidak salah sasaran.

Rujukan Ketiga, ditulis oleh (Wulan et al., 2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan kemiskinan di Kota Probolinggo berdasarkan data-data yang diperoleh. Fokus dalam penelitian ini adalah Potensi Kelompok Bersama binaan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, Peran serta Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanggulangan Kemiskinan, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keluarga penerima manfaat (KPM) yang terjadi di daerah tersebut. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diolah melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi. Tahap analisa dilakukan dimulai dari proses pemilihan data-data yang diperlukan, kemudian data disusun dan disajikan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, sesungguhnya dirasakan sebagai salah satu taktik yang cukup ampuh untuk mengatasi berbagai pergolakan dari perubahan struktural di sektor industri dan pertanian serta mengurangi dampak terjadinya kemiskinan.

Persamaan pada penelitian tersebut sama-sama membahas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan menggunakan kualitatif, sedangkan perbedaannya dalam potensi yang dilakukan penanggulangan kemiskinan tidak tersusun dengan baik antara mengolah data-datanya.

Rujukan Keempat, yang ditulis oleh (Meitasari et al., 2015) dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan Tradisional Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Kemiskinan di area perikanan disebabkan oleh adanya beberapa masalah seperti *illegal fishing*. Adanya mata rantai perekonomian yang masih dikuasai dan dikendalikan oleh pemborong dan para juragan sehingga membuat harga ikan itu menjadi tidak stabil dan bahkan kadang sangat rendah. Beberapa perairan di Indonesia yang telah mengalami *over fishing* seperti di laut Jawa, Samudra Hindia, serta laut Sumatra dan ditambah lagi jangkauan nelayan diperairan lepas sangat rendah sehingga menjadikan sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dalam mendorong upaya peningkatan produksi, nilai tambah produk dan tumbuhnya wirausaha baru dibidang Perikanan Tangkap wilayah Pati. Untuk meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil Kabupaten Pati secara berkelanjutan dapat melalui penaikan wirausaha dibidang Perikanan Tangkap. Meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok Perikanan Tangkap diwilayah Pati yang kuat serta membangun jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam akses permodalan usaha perikanan tangkap.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan, sedangkan perbedaannya adalah kelembagaan dalam wirausaha dibidang perikanan.

Rujukan Kelima, yang ditulis oleh (Roebyantho & Unayah, 2015) dengan judul implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni di Kota Garut, Jawa Barat. Dalam bukti, sejak perumahan masih merupakan salah satu kebutuhan yang sulit terjangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu karena pendapatan yang tidak stabil, rendahnya peluang lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dapat dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar diakui secara umum yakni meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat di pengaruhi atau mengganggu tingkat kesejahteraan hidupnya.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan, sedangkan perbedaan penelitian ini program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni.

Rujukan Keenam, ditulis oleh (Yacoub, 2012) dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan dilaksanakan dalam mewujudkan kemakmuran hidup masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan sosial masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu pihak penting

untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang atau jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang atau jasa tersebut sehingga pengangguran dapat berkurang dan tingkat kemiskinan semakin menurun. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya.

Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja dapat diharapkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah. Kenyataan yang terjadi, dimana kondisi Kalimantan Barat dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah dibandingkan dengan Kalimantan lainnya, tetapi tingkat kemiskinan paling tinggi dari provinsi Kalimantan lainnya. Penelitian ini berbasis pada penelitian deskriptif. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling dasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah umum karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran.

Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas kebijakan pemerintah dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan, sedangkan perbedaannya tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

Rujukan Ketujuh, yang ditulis oleh Ade Triono, 2019 dengan judul Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. Menurut pendapat Bappenas Penyebab Utama Kemiskinan adalah: Pendidikan yang rendah; ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; Ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; Alokasi anggaran kredit yang terbatas; Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; penataan ekonomi secara tradisional; Rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; Budaya menabung yang belum berkembang; Tidak adanya jaminan sosial untuk masyarakat desa; Rendahnya jaminan kesehatan. Rencana dapat dijalankan dengan menggunakan analisis SWOT sebagaimana pendapat dari Rangkuti (2014:19) yang menjelaskan bahwa “Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang menggunakan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*opportunities*) secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Keterlibatan Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan mendorong produktivitas, taktik yang dipilih adalah dalam peningkatan kemampuan dasar keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja serta informasi pasar, Melibatkan keluarga miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang mengatasi kemiskinan, sedangkan berbeda dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Rujukan kedelapan yang ditulis oleh (Prawoto, 2008) dengan judul Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Masalah kemiskinan bukan hanya melibatkan negara dunia ketiga melainkan juga negara yang sedang berkembang. Hal ini karena disamping kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya secara layak (kemiskinan *absolut*) namun juga berkaitan dengan perbandingan yang timpang antara penduduk berpenghasilan tinggi dengan penduduk berpenghasilan yang paling rendah.

Persamaan pada penelitian ini sama sama membahas setrategi dalam penangulanan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, sedangkan perbedaannya menguatnya arus urbanisasi yang lebih parah.

Rujukan Kesembilan yang ditulis oleh (Putera, 2007) dengan judul Analisis terhadap dalam Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi wujud kemiskinan sangatl strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan pembangunan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah

yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir dalam sikap mental mereka. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Keadilan dan kesejahteraan sosial itu merujuk kepada suatu kondisi sosial. Indikator yang biasa digunakan pun cukup jelas, diantaranya adalah angka kriminalitas, tingkat pengangguran, angka illiterasi di kalangan masyarakat, kemiskinan, dan lain sebagainya. Semakin rendahnya angka tersebut menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi, sebaliknya jika angka hal-hal di atas semakin tinggi maka dapat dipastikan pula tingkat kesejahteraan mereka semakin rendah.

Persamaan pada penelitian ini adalah strategi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam pemerdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, sedangkan perbedaan pada pola pikir mereka dalam mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupan serta membantu dan memberdayakan berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Rujukan Kesepuluh yang ditulis oleh (Sulhan & Sasongko, 2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). Adapun dampak yang di rasakan masyarakat Kelurahan Kauman dalam program kartu indonesia pintar (KIP) adalah menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi di tingkat dasar dan menengah, mencegah anak atau siswa yang putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan menarik anak yang putus sekolah agar kembali ke sekolah, membantu anak atau siswa kurang

mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran dan mendukung penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Dampak yang di rasakan oleh masyarakat Kelurahan Kauman dalam program Kartu Penjamin Sosial adalah dengan memiliki rumah tangga berhak menerima program perlindungan sosial, seperti: Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Sebagai penanda rumah tangga miskin, kartu penjamin sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari program subsidi beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan program beras masyarakat miskin (Raskin). Menurut beberapa informan dampak yang dirasakan sangat membantu perekonomian dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang ada di Kelurahan Kauman Kota Malang. “Dengan adanya bantuan bersubsidi beban masyarakat menjadi ringan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Berdasarkan pembagian masyarakat dilakukan oleh petugas untuk memudahkan dalam pembagian bantuan yang dimaksud kartu penjamin sosial dan kartu indonesia pintar di wilayah Kota Malang khususnya di Kelurahan Kuaman yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 560 jiwa warga miskin diantaranya yang berhak mendapatkan kartu penjamin sosial hanya 30% sedangkan kartu indonesia pintar sebanyak 5%. Sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin.

Persamaan pada penelitian ini sama sama membahas implementasikan kebijakan dalam penanggulangan kmiskinan, sedangkan perbedaan penangulanan kemiskinan melalui kartu penjamin sosial dan kartu indonesia pintar pada masyarakat miskin.

Penelitian ini terdahulu lebih membahas tentang Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (Arif Haryana, 2009; Ade Triono, 2019; Prawoto, 2008). Namun, ada juga beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas Evaluasi Implementasi Kebijakan

Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Meitasari et al., 2015). Kemudian ada juga yang membahas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Wulan et al., 2019). Ada juga yang membahas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) (Roebyantho & Unayah, 2015). Dan ada juga yang membahas Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Yacoub, 2012). Serta Analisis Terhadap Dalam Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia (Putera, 2007). Dan Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada Masyarakat (Sulhan & Sasongko, 2017).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan strategi pemerintah dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan namun itu pun dengan keterbatasan program lainnya. Adapun penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan dalam capaian *Sustainable Development Goals* atau pembangunan berkelanjutan.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi, baik instansi maupun pemerintah dalam mencapai atau target point pertama yaitu tanpa kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan memberikan tambahan data mengenai penerapan tersebut yang efektif dan efisien.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Berbagai temuan penelitian diharapkan bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi, khususnya di Daerah Kabupaten Bekasi dalam menangani penanggulangan kemiskinan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGS)* agar semakin baik yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi, penulis membuat sistematika dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai topik penelitian yang diambil. Di dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistem penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Berisi kajian teori yang digunakan dalam penelitian, serta kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah, seperti paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data: *goodness and quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak mendukung dengan teori yang digunakan, membedakan dan mensamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada bab ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dan saran dari peneliti untuk tempat dari objek peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang judul-judul jurnal, buku, *alamat website* dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis.